

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan bangsa dan negara. Lembaga pemerintah dibentuk umumnya untuk melakukan aktivitas layanan kepada masyarakat luas dan sebagai organisasi nirlaba yang mempunyai tujuan bukan untuk mencari keuntungan semata tetapi untuk menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan layanan tersebut di masa yang akan datang. Tujuan yang akan dicapai biasanya dalam bentuk kualitatif, misalnya kenyamanan dan keamanan, pendidikan maupun dalam kesehatan. Dalam mencapai tujuannya, Lembaga Pemerintah, seperti Pemerintah Daerah, Kementrian Departemen maupun Non-Departemen, atau Lembaga lain memerlukan dana dari sumber resmi yang ditetapkan berdasar peraturan perundangan yang berlaku.

Ketentuan tentang Pemerintah Daerah diatur oleh UU No.22 Tahun 1999 yang direvisi dengan UU No.32 Tahun 2004. Ketentuan tentang Pemerintah Daerah tidak berdiri sendiri, tetap diikuti oleh ketentuan tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah diatur dalam UU No.25 Tahun 1999 yang direvisi dengan UU No.33 Tahun 2004. Ketentuan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan perundang-undangan yang berhubungan dengan kebijakan desentralisasi dan Otonomi Daerah. Dalam Otonomi Daerah, Pemerintah

Daerah (Pemda) diberikan keleluasaan dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran yang sesuai dengan kepentingan daerahnya masing-masing. Setiap daerah diberikan kewajiban dan kewenangan untuk menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah. (Sartika, 2018)

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka APBD. (Permendagri, 2011). Dalam APBD, Salah satu laporan keuangan yang sangat penting adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA). LRA berfungsi untuk mengetahui keadaan keuangan suatu instansi/lembaga Pemerintah.

LRA yang dipublikasikan Pemda memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan Pemda. LRA merupakan jenis laporan keuangan daerah yang dahulu dihasilkan sebelum membuat laporan neraca dan laporan arus kas. Berdasarkan laporan realisasi anggaran tersebut pembaca laporan dapat membuat analisis kinerja laporan keuangan berupa analisis pendapatan, analisis belanja, dan analisis pembiayaan. (Mahmudi, 2010). Anggaran bagi lembaga pemerintahan merupakan tulang punggung (*backbone*) penyelenggaraan aktivitasnya. Anggaran memiliki peran penting sebagai alat stabilisasi, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan,

pengendalian organisasi dan penilaian kinerja serta menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang utama.

Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran merupakan komponen penting yang mengundang perhatian publik. Hal itu disebabkan karena masyarakat sebagai pemberi dana publik (*publik fund*) melalui pajak daerah yang mereka bayarkan berkepentingan untuk mengetahui apakah dana tersebut telah digunakan dengan semestinya, efisien, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Belanja daerah tersebut juga mencerminkan kebijakan menghasilkan pendapatan berupa suatu hal yang lebih sulit dibandingkan membelanjakan. Karena sifat belanja yang relatif mudah dilakukan dan rentan akan terjadinya inefisiensi dan kebocoran, maka perencanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap belanja sangat penting dilakukan. Setelah dibelanjakan dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, analisis terhadap belanja ini pun mutlak harus dilakukan untuk dijadikan dasar evaluasi, koreksi dan perbaikan ke depan. (Mahmudi, 2010)

Dari pembahasan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membuat sebuah laporan tugas akhir dan laporan praktik magang dengan judul “*Analisis Kinerja Anggaran Dan Realisasi Belanja pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018-2020*”.

## **B. Tujuan**

Tujuan dari penulisan laporan tugas akhir dan praktik magang untuk mengetahui perkembangan kinerja anggaran dan realisasi belanja pada BPKD Kabupaten Klaten periode 2018-2020.

### **C. Manfaat**

#### 1. Manfaat Bagi Penulis

- a) Menambah pengetahuan dan pengalaman mengenai kegiatan yang dilakukan di Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Klaten.
- b) Sebagai media penerapan ilmu yang telah dipelajari selama kuliah Bagi Perusahaan.

#### 2. Bagi Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Klaten

Sebagai bahan pertimbangan bagi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Klaten mengenai perkembangan Kinerja laporan realisasi anggaran belanja di masa yang akan datang agar berkembang semakin baik.

#### 3. Bagi STIM YKPN

- a) Dapat dijadikan sumber informasi dan referensi terkait dengan materi analisis anggaran dan realisasi.
- b) Dapat menjadi bahan acuan dalam penyusunan laporan tugas akhir dengan pembahasan yang sama di masa yang akan datang.

### **D. Batasan Masalah**

Adapun batasan masalah pada penulisan laporan tugas akhir dan praktik magang ini adalah data laporan anggaran belanja periode 2018-2020 pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Klaten.